

## RESOLUSI KONFLIK PEDAGANG KAKI LIMA DI SEMOLOWARU SURABAYA

**Tedy Febrianto**

S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya  
febrianto.tedy@yahoo.com

**Ali Imron**

S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya  
Aimron8883@gmail.com

### Abstrak

Kawasan Perdagangan Pedagang Kaki Lima Semolowaru merupakan kawasan perdagangan yang terbesar di Kota Surabaya. Letaknya yang strategis, yaitu di jalur utama Semolowaru, menjadikan kawasan ini penuh dengan berbagai aktivitas warga kota. Tujuan Penelitian ini agar mengetahui Permasalahan yang terjadi antara pedagang kaki lima dengan pemerintah agar dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Surabaya untuk menata dan mengelola kawasan perdagangan secara menyeluruh, terutama dengan adanya upaya dari pemerintah untuk menata tata kota dan menjadikan sentra-sentra pedagang kaki lima. Subyek penelitian adalah para pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan Semolowaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan teori Johan Galtung. Jika dilihat secara sepintas memang hanya Pedagang Kaki Lima yang diuntungkan dengan beraktivitas di trotoar dan bahu jalan karena pendapatannya meningkat, dan warga sebagai pihak yang paling dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan konflik Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah mencari resolusi yang saling menguntungkan atau *win win solution*. Strategi yang dapat dilakukan dengan menata kawasan dengan melibatkan pelaku utama kawasan yaitu warga sekitar, Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah agar membuat peraturan daerah yang khusus mengatur Pedagang Kaki Lima dan membuat institusi yang khusus menangani Pedagang Kaki Lima.

**Kata kunci:** Resolusi Konflik, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah

### Abstract

Street Vendor Trade Zone Semolowaru is the largest trade area in the city of Surabaya . The strategic location , which is on the main line Semolowaru , making this region is filled with a variety of activities citizens . The purpose of this study in order to find out the problems that occurred between street vendors with the government in order to serve as an input for the Government of Surabaya to organize and manage the overall trade area , especially with the efforts of the government to organize the layout of the city and make the centers of street vendors . Subjects were the vendors who trade in Semolowaru region . This research is a descriptive qualitative research approach . The data have been obtained and analyzed descriptively using the theory of Johan Galtung . If it is only seen in passing hawkers are benefited with the move on the pavement and the shoulder of the road due to increased revenue , and citizens as the most disadvantaged . To overcome the problem of conflict of Street Vendors and Government seek mutually beneficial resolution or a win win solution . Strategies to do with managing the region by involving the main actors , namely the area surrounding residents , Street Vendors and Government to make local laws that specifically regulate hawkers and create institutions that specifically deal with street vendors .

**Keywords :** Conflict Resolution , Street Vendors , Government

### PENDAHULUAN

Kota merupakan tempat pemukiman yang mempunyai wilayah yang besar, mempunyai jumlah penduduk yang padat dan mempunyai latar belakang dari setiap penduduk dengan bermacam-macam individu. Kota merupakan pusat kegiatan masyarakat dari perbedaan individu yang berada di dalam kota untuk melaksanakan kesibukan dan kepentingan yang berbeda dari setiap tujuan yang ingin didapatkan di kota.

Kota mempunyai daya tarik tersendiri untuk menjadi tempat tujuan masyarakat desa untuk datang dan menikmati kota. Kota sering dianggap sebagai tempat yang sangat menjanjikan untuk mencari mata pencaharian. Dalam beberapa hal, permasalahan yang ada menyebabkan perubahan bagi kebiasaan orang, biasanya kebanyakan warga perkotaan berubah dari yang biasanya bersama menjadi lebih bersifat individualis dan interaksinya bersifat impersonal. Jika ada kepentingan dan

menciptakan orientasi masyarakat hanya sebatas kepentingan yang akan menghasilkan sebuah keuntungan material ekonomi. Bagi setiap individu, inilah yang menjadikan ikatan kelompok kekerabatan dan hubungan antara warga satu dengan lainnya menjadi lemah. Hal ini menjadikan masalah bagi masyarakat kota. Oleh karena itu masyarakat kota harus mampu menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha baru untuk memenuhi kebutuhan material ekonomi setiap keluarga.

Salah satu usaha pada sektor ekonomi yang ada pada masyarakat perkotaan adalah dengan menjadi pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima menjadi fenomena sosial dan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu ciri dan karakteristik dari negara-negara yang sedang berkembang seperti. Pedagang kaki Lima dibedakan dari pedagang lain berdasar jenis peruntukan dan status kepemilikan lokasi usaha mereka, bukan berdasar kekuatan modal, cara kerja ataupun status legalitas mereka. PKL akan selalu memilih tempat strategis yang bisa ditempati untuk berjualan. Di setiap tempat kosong yang menjadi arus lalu lintas pejalan kaki maupun pengendara akan menjadi tempat utama menggelar dagangannya. Barang yang diperdagangkan pun beragam tergantung dari sifat dan karakter tempat dan aktivitas masyarakat yang melakukan aktivitas disekitar jalan. (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/855>. Diakses 8 Agustus 2014)

Pedagang kaki lima sering dipandang sebagai sektor liar dan sektor yang mengganggu, tergolong dalam masyarakat jelata atau semata-mata dianggap sebagai pekerjaan yang tidak sesuai. Pedagang kaki lima sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota atau sebagai suatu pilihan terakhir kesempatan kerja bagi banyak orang agar terhindar dari predikat pengangguran.

Namun demikian sektor modern berupa *manufacturing* dan industri tidak mampu menyerap angkatan kerja baik penduduk kota yang semula ada dan ditambah dengan penduduk pendatang. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup memaksa angkatan kerja untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal yaitu pedagang kaki lima. Perkembangan sektor informal terutama pedagang kaki lima menjadi semakin menjamur dikarenakan strategi pembangunan yang dilakukan secara keseluruhan menekankan pada kebijaksanaan pembangunan yang dipusatkan di perkotaan dan mengabaikan pedesaan. Kegiatan sektor pertanian di pedesaan akhirnya tidak dapat lagi menampung angkatan kerja yang terus berkembang, sehingga angkatan kerja yang ada melakukan migrasi ke kota dengan mengharapkan mendapatkan pekerjaan dari sektor industri di perkotaan. Penambahan angkatan kerja baik yang

berasal dari kota itu sendiri dan ditambah dengan tenaga kerja yang berasal dari pedesaan (biasanya mereka merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus) tidak dapat ditampung oleh sektor industri yang ada. Salah satunya sektor pedagang kaki lima, dimana orang-orang golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain. Baik berjualan di tempat terlarang atau tidak.

Realitas perekonomian sektor informal pedagang kaki lima jika dilihat secara sosiologis, pedagang kaki lima merupakan entitas sosial yang di dalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama. (Sarjono, 2001: 5). Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Barang dan jenis dagangan yang berbeda biasanya terkait dengan perbedaan latar belakang dan karakteristik pelaku pedagang kaki lima. (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/tag/1695/pelaku-sektor-informal>. Diakses 8 Agustus 2014)

Pedagang Kaki Lima merupakan aktivitas ekonomi sektor informal yang cukup menjanjikan dan diminati oleh masyarakat migran di kota-kota besar. Meskipun bagi sebagian besar sangat berkeyakinan bahwa mengawali kerja sebagai PKL membutuhkan modal yang tidak sedikit dan kekuatan mental yang tinggi. Selain harus siap bertarung tidak laku selama beberapa bulan, juga harus siap menghadapi berbagai tekanan dari pihak formal seperti birokrasi maupun juga pihak lain seperti preman. Tekanan dari birokrasi bisa seperti pembayaran retribusi secara rutin dan juga seperti penertiban, pergusuran atau obrakan.

Fenomena penertiban PKL di kota-kota besar selalu menjadi peristiwa harian yang tiada henti. Hampir setiap saat PKL harus bersiap perihal kejadian-kejadian penertiban tempat lapak berdagang tersebut. Sebagai profesi sektor informal, maka Pedagang Kaki Lima memang selalu menerima resiko berat ini. Terminologi penertiban selalu mengadung pesan penggusuran Pedagang Kaki Lima dari tempatnya berjualan. Alasan utamanya adalah untuk ketertiban sosial dan meminimalisasi ketidaknyamanan aktivitas jalan raya dari gangguan perdagangan.

Sementara gangguan yang dialami PKL dari luar birokrasi adalah pemerasan preman. Para preman merupakan sindikasi yang seringkali melakukan aksi pemerasan kepada hampir semua Pedagang Kaki Lima dengan alasan jasa keamanan. Bahwa Pedagang Kaki Lima telah menempati tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai daerah kekuasaan para preman tersebut.

Pada kondisi ini maka PKL berada dalam situasi dilematis yang membuat mereka harus menerima.

Dengan semakin berkembangnya PKL menyebabkan Kontribusi yang positif antara lain : pertama munculnya Pedagang Kaki Lima berarti memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang menganggur, bahkan memberikan lapangan kerja baru seperti tukang parkir di sekitar warga jalan Semolowaru. kedua pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara murah dan mudah untuk warga jalan Semolowaru, dan ketiga terjadi pola relasi yang menguntungkan antara Pedagang Kaki Lima dengan masyarakat warga jalan Semolowaru, di mana masyarakat kemudian akan ikut berjualan untuk menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Pedagang Kaki Lima seperti berjualan sayur dan penitipan lapak gerobak berjualan.

Sedangkan kontribusi negatif lebih diletakkan pada implikasi negatif yang ditimbulkannya, seperti: pertama menyebabkan kesemrawutan arus lalu lintas. Kedua, kesan kumuh dan kotor tidak terhindarkan. Ketiga, potensi konflik rebutan lahan dagang maupun tempat parkir oleh para pedagang kaki lima dan keempat, potensi kriminalitas dan ajang munculnya penyakit masyarakat seperti pencurian motor dan helm yang di parkir di sekitar jalan semolowaru. Berbagai upaya selalu dilakukan tetap saja tidak membuahkan hasil maksimal, kecuali dilakukan sebuah tindakan-tindakan represif. Hal ini mengingat kehadiran Pedagang Kaki Lima telah memberikan dua bentuk kontribusi

Dengan adanya pedagang kaki lima dalam kehidupan perkotaan kota Surabaya telah memunculkan berbagai permasalahan bagi ketertiban kota Surabaya. Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. (<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/6820>. Diakses 8 Agustus 2014)

Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh Pedagang kaki lima adalah seringnya Pedagang Kaki Lima menjadi korban penggusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil. Dalam pandangan pemerintah, tentunya keberadaan Pedagang Kaki Lima yang ada di kota ini mengganggu keindahan dan ketertiban. Jalan cepat yang diambil pemerintah untuk keluar dari masalah ini adalah menggusur keberadaan Pedagang kaki lima. Dalam bahasa pemerintah penggusuran mengalami penghalusan menjadi penertiban. Padahal intinya sama

saja, mengusir Pedagang Kaki Lima dari lapak atau tempat berdagangnya.

Selain cepat tentu jalan ini dinilai praktis dan ekonomis. Praktis karena dengan menggusur dalam hitungan jam saja keberadaan Pedagang kaki lima yang mengganggu sudah tidak tampak lagi. Ekonomis karena tidak dibutuhkan dana yang besar untuk sekedar melakukan penggusuran; paling tinggal mengerahkan tenaga Satpol PP dan mengoperasikan sebuah alat berat (buldoser) yang tanpa ampun bisa meratakan bangunan usaha Pedagang kaki lima dalam hitungan cepat.

Permasalahan Konflik Pedagang kaki lima menjadi menarik, karena Pedagang Kaki Lima menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi Pedagang Kaki Lima sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain Pedagang kaki Lima menjalankan peran sebagai bayang-bayang ekonomi. Namun, mengingat bahwa kontribusi Pedagang Kaki lima sangat besar bagi semua kalangan masyarakat. Keberadaannya sangat membantu masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resolusi konflik permasalahan PKL yang ada pada kawasan semolowaru

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode ini dapat menggambarkan dan meringkas seluruh aspek dari penelitian yang dimaksudkan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif juga menggunakan wawancara terbuka untuk menelaah dan mendalami sikap, pandangan, dan perilaku individu ataupun sekelompok orang.

Hutomo (dalam Hadari, 2001 : 32) berpendapat, bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dll.) dan peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan dan menarik kesimpulan.

metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui dan menelaah suatu latar belakang, terutama mengenai sejauh mana permasalahan dan konflik yang terjadi dengan adanya sentralisasi yang dilakukan pemerintah kota surabaya terhadap Pedagang Kaki lima yang berada di kawasan jalan Semolowaru.

Lokasi penelitian adalah PKL yang berada pada kawasan semolowaru Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena adanya konflik permasalahan yang terjadi sebelum dan sesudah Sentralisasi Pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah, selain itu dengan adanya penggusuran pemindahan tempat (relokasi), Menggiatkan kembali Pedagang Kaki Lima (revitalisasi), dan penyatuan dan pemusatan tempat pedagang kaki lima

(sentralisasi). Dimana banyak konflik yang masih belum terselesaikan dan menjadikan kesenjangan antara sesama pedagang satu dengan yang lain. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013.

Yin (1996 : 18). Menurut Robert K, Subyek atau informan penelitian meliputi Pedagang Kaki Lima yang ada pada sentra Pedagang Kaki Lima di semolowaru. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif. Dimulai dari wawancara secara mendalam yang mana merupakan data mentah, yang selanjutnya diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan teori yang digunakan, sehingga akan menjadi suatu informasi dari hasil penelitian yang jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Permasalahan pedagang kaki lima di lingkungan Semolowaru dari Marginalisasi hingga Perilaku pedagang kaki lima. pedagang kaki lima seolah menjadi permasalahan bagi pemerintah kota dalam melakukan penataan kota surabaya. Kehadiran Pedagang Kaki Lima yang berserakan dimana-mana, di setiap sudut pinggir jalan, bahu jalan, emperen toko, tanah kosong, dan sebagainya yang berada di lingkungan jalan Semolowaru, seolah telah memperburuk citra sebagai kota metropolitan Surabaya. Itulah sebabnya, selalu saja muncul fenomena pengusuran dengan alasan penertiban kepada setiap Pedagang Kaki Lima yang dianggap melanggar ketertiban umum terutama macetnya jalan di Semolowaru. Fenomena tersebut kemudian berimplikasi bagi lahirnya berbagai perlawanan (resistensi) pedagang kaki lima terhadap upaya untuk menertibkan kehadiran Pedagang Kaki Lima. Perlawanan-perlawanan tersebut bisa saja dilakukan secara kolektif, maupun secara individual oleh Pedagang Kaki Lima. Karena fenomena ini menjadi klasik dan berulang terus-menerus, maka tidaklah heran jika banyak orang menganggap fenomena pengusuran ini sebagai perilaku Pedagang Kaki Lima di Semolowaru. Dengan adanya perlawanan dari Pedagang Kaki Lima terhadap berbagai upaya yang mengganggu kepentingan Pedagang Kaki Lima, baik yang dilakukan secara formal maupun non formal.

Alisyahbana (2006 : 46) Marginalisasi sektor informal ini berlangsung secara terus-menerus. Istilah marginal atau adanya pembatasan memang menyangkut problema keterpinggiran atau dipinggirkan dalam arus utama. Pedagang Kaki Lima menjadi marginal karena biasanya : pertama, profesi ini dipilih oleh mereka yang tidak terserap pada sektor formal. Kedua, menjalankan pekerjaan ini tidak membutuhkan syarat-syarat formal khusus, karena setiap orang memiliki peluang yang sama

untuk menjadi Pedagang Kaki Lima. Artinya, tidak pernah ada lowongan kerja untuk menjadi Pedagang Kaki Lima karena memang bukan sebuah perusahaan. Ketiga, penyebutan sektor informal sesungguhnya memberikan indikasi bahwa sektor ini bukanlah menjadi pekerjaan resmi yang dilindungi oleh perundang-undangan. Situasi-situasi yang bersifat eksternal maupun internal kian memperjelas kedudukan yang marginal dari Pedagang Kaki Lima.

Pilihan menjadi Pedagang Kaki Lima lebih didorong karena keterpaksaan ekonomi hidup di kota besar dan Pedagang Kaki Lima merupakan sasaran untuk dirinya yang belum mendapatkan pekerjaan pada sektor formal karena itu dengan menjadi Pedagang Kaki Lima resiko sosial terlalu tinggi, apalagi jika barang dagangannya tidak laku. Selain harus menanggung kerugian material, Informan juga harus dihadapkan pada mendesaknya kebutuhan hidup sehari-hari. Dilematika inilah yang seringkali menghantui mereka yang baru memulai aktivitasnya sebagai Pedagang Kaki Lima. Selain itu, pilihan menjadi Pedagang Kaki Lima karena alasan pewarisan usaha dari keluarga. Artinya, keberhasilan keluarganya yang mendorong menjadi Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima jenis ini lebih bersifat turun temurun dan memiliki hubungan persaudaraan, sehingga memiliki keterikatan dan kerjasama yang baik antar keluarga.

Pada dasarnya, marginalisasi sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima merupakan implikasi nyata dari sejarah panjang kehadiran informan sebagai pedagang, baik dalam soal perizinan maupun tanah/lahan yang digunakan. Temuan dalam penelitian yang didapatkan dari wawancara menyebutkan bahwa hampir tidak ada Pedagang Kaki Lima yang memiliki lahan sendiri untuk menggelar dagangannya. Pedagang Kaki Lima menggunakan lahan-lahan kosong yang secara formal-yuridis tidak diperbolehkan sebagai tempat berdagang. Pedagang Kaki Lima selalu memanfaatkan lahan kosong dan strategis untuk menggelar dagangannya. salah satu contohnya di daerah jalan semolowaru.

Sehingga tidak dipungkiri Salah satu musuh utama pemerintah kota Surabaya adalah bagaimana menata Pedagang Kaki Lima agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya karena keberadaan pedagang kaki lima. Hampir tiap hari terdapat rencana tentang penertiban Pedagang Kaki Lima di beberapa tempat termasuk di daerah jalan Semolowaru. Tidak saja soal penertiban, melainkan juga bentrokan selalu mewarnai setiap upaya menertibkan Pedagang Kaki Lima. Penertiban Pedagang Kaki Lima yang diselenggarakan pada dasarnya memiliki legitimasi formal. Selain keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan

fasilitas public dan tidak memiliki payung hukum, mereka juga tidak mengindahkan adanya aturan untuk tidak berjualan di sekitar tempat tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah kota Surabaya jelas memiliki keabsahan untuk melakukan penertiban. Tidak heran jika kemudian muncul sejumlah fenomena penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima secara kuat di kota Surabaya. Hampir tiap hari pemerintah berbagai upaya melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di daerah Jalan Semolowaru dan tiap hari pula Pedagang Kaki Lima mengalami bentrokan fisik antara petugas Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima yang tidak rela barang dagangannya diangkut secara paksa.

Dalam perspektif yuridis, upaya pemerintah untuk melakukan penertiban seharusnya tidak menjadi persoalan. Bagaimanapun dalam logika publik apalagi logika yuridis, penggunaan fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran, ditambah lagi jika penggunaannya justru malah menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat lainnya. Kuatnya upaya penertiban PKL di kota Surabaya khususnya di daerah Semolowaru tersebut merupakan langkah intensif untuk menata kota. Selain itu Di Surabaya, seperti di jalan Diponegoro, daerah Keputran, jalan Rajawali, daerah Rungkut, sekitar pasar Kupang, sepanjang pinggir Kali Mas, sekitar pasar Tembok adalah tempat-tempat yang selalu menjadi sasaran penertiban.

Dalam pengamatan peneliti, kuatnya penertiban Pedagang Kaki Lima di daerah-daerah tersebut dilakukan karena hampir tidak ada kemauan baik dari Pedagang Kaki Lima untuk tidak menjalankan aktivitasnya di tempat-tempat tersebut. Penertiban Pedagang Kaki Lima di daerah jalan Semolowaru dilakukan tidak hanya satu kali dalam setahun, bahkan mencapai 4 kali. Luar biasanya, meskipun selalu ada upaya penertiban, Pedagang Kaki Lima tetap saja menggelar dagangannya di tempat-tempat semula. Caranya memang tidak langsung berjualan pasca penertiban, melainkan menunggu jeda beberapa hari, kemudian mereka akan kembali berjualan.

Scott (2000:40). resistensi merupakan perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus karena perlawanan atas tekanan yang menimpa mereka. Bagi Scott, resistensi tidak akan sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Resistensi yang biasanya dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di daerah semolowaru terjadi dengan melakukan perlawanan dan juga sering terjadi bentuk kekerasan fisik hingga pembakaran lapak tempat berdagang. Aktivitas Pedagang Kaki Lima yang menggunakan ruang publik dan terkadang juga tanah orang lain, mendorong pemerintah kota Surabaya melakukan penertiban bagi

Pedagang Kaki Lima. Biasanya petugas melakukan penertiban setelah melalui berbagai cara terlebih dahulu seperti memberinya surat peringatan dan menegur supaya tidak berjualan di tempat tersebut. Tapi ketika hal tersebut tidak dipatuhi oleh Pedagang Kaki Lima, maka terjadilah tindakan pembersihan ruang kota (penataan) terhadap Pedagang Kaki Lima. Tindakan ini melahirkan perlawanan dari Pedagang Kaki Lima, baik perlawanan terbuka, terselubung maupun normatif.

Fenomena ini bukanlah barang baru lagi. Seolah penertiban yang selalu digelar oleh pemerintah tidaklah membuat Pedagang Kaki Lima menghentikan aktivitas pedagang Kaki Lima dalam berjualan. Nyaris tidak pernah ada perubahan berarti dalam upaya memfungsikan kembali fasilitas publik yang steril dari Pedagang Kaki Lima. Penertiban selalu digelar, tetapi tetap saja Pedagang Kaki Lima tidak berhenti berdagang. Melainkan, justru mengalami penambahan. Realitas ini tampaknya harus menjadi bahan kajian bagi pemerintah, terutama dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima.

Sehingga sudah menjadi pemandangan umum bahwa perkembangan kota selalu beriringan dengan meningkatkan jumlah Pedagang Kaki Lima dimanamana. Tidak itu saja, Pedagang Kaki Lima merupakan persoalan yang paling sulit diatasi oleh pemerintah. Tidak saja karena hanya memunculkan perlawanan berlarut-larut dari Pedagang Kaki Lima, tapi juga menunjukkan bahwa penertiban yang selama ini dijalankan tidak efektif untuk menata Pedagang Kaki Lima. Menjadi wajar pula jika Pedagang Kaki Lima seringkali melakukan perlawanan resistensi terhadap upaya penertiban. Bermula dari penertiban yang dijalankan oleh pemerintah inilah muncul selalu dalam setiap penertiban mencitrakan Pedagang Kaki Lima sebagai pedagang yang sangat sulit diatur. Pada kondisi lain, realitas ini memunculkan perilaku membandel Pedagang Kaki Lima dari perspektif sosiologis. Pedagang tetap mempertahankan sebagai langkah taktis agar keberadaannya sebagai Pedagang Kaki Lima tetap eksis, meskipun selalu mendapat tekanan dan penertiban yang bisa jadi berujung pada pengangkutan barang-barang dagangan Pedagang Kaki Lima.

Keinginan Pedagang Kaki Lima ini memang terkadang cenderung berlebihan. Betapa tidak, awalnya Pedagang Kaki Lima berdagang dengan menggunakan tempat yang dilarang berdagang, tapi ketika ditertibkan mereka meminta lahan lain yang harus disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Padahal sejak semula Pedagang Kaki Lima sudah diperingatkan bahwa ada larangan berjualan di tempat-tempat tersebut, tetapi tetap saja nekat dan menuntut ganti rugi setelah mereka ditertibkan. Realitas ini memang paradoks dan

problematika bagi pemerintah dan Pedagang Kaki Lima itu sendiri yang harus mendapatkan solusi strategis untuk mencari jalan keluarnya.

### Resolusi Konflik Yang Terhentikan

Penelitian ini menemukan bukti bahwa perlawanan Pedagang Kaki Lima selain perorangan dan teroganisir adalah bagian dari cara bertahan di tengah derasnya kompetisi hidup di kota Surabaya. Ketakutan akan kehilangan lapangan pekerjaan yang dengan sendirinya berarti hilang pula penghasilan dan status sosialnya, membuat Pedagang Kaki Lima begitu Kuat melakukan perlawanan. Tidak saja dengan berhadapan langsung aparat, tetapi juga menyusun kekuatan dalam melakukan perlawanan. Tidak heran jika Pedagang Kaki Lima menjadi persoalan yang tidak bisa terselesaikan secara berkesinambungan, justru mereka akan kian menyimpan emosi untuk selalu berjualan demi menyambung hidupnya.

Permasalahan konflik pedagang kaki lima yang berada pada daerah Semolowaru, yang akan menolak dengan adanya pengusuran yang terjadi dilakukan pemerintah kota Surabaya dengan melakukan penertiban untuk memperindah kota. Hal ini dilakukan pemerintah hanya untuk kepentingan semata dengan adanya relokasi yang dilakukan secara tidak langsung pemerintah telah menyiapkan tempat baru yang dijadikan para pedagang untuk pindah menepati tempat yang telah di persiapkan. Di sisi lain, adanya tempat baru yang dipesiapkan juga akan menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi para pedagang kaki lima, seperti dengan adanya pembeli yang tidak mengerti tempat berjualan yang baru, biaya yang mahal dari pemerintah kota untuk setiap stan berjualan dan permasalahan baru dari adanya sentralisasi tempat stan berjualan yang ada akan menjadikan saingan antara pedagang satu dan yang lain. Meskipun ,mau tidak mau para pedagang akan mengikuti kebijakan pemerintah karena jika tidak akan menanggung permasalahan baru dengan adanya pengusuran dan tidak adanya tempat berjualan yang baru dan strategis. Adanya permasalahan yang terjadi pada Pedagang Kaki Lima dengan Warga sekitar dan Pemerintah kota surabaya yang telah mengusur tempat berdagang ini sudah sering terjadi mulai tahun 2000 dan akhirnya memuncak pada tahun 2012 akhir, dimana konflik ini sangat besar dan bersifat keras, benturan antara satpol PP dan pedagang Kaki Lima berakhir dengan dengan benturan fisik dan pembakaran tempat berjualan. Selain itu kurang jelasnya penyediaan tempat berjualan baru yang ada, hal ini semakin menjadikan Pedagang Kaki Lima tetap bertahan untuk berjualan di Jalan Semolowaru.

Wirawan, (2010:138). menurut Johan Galtung, Selama ini konflik selalu diidentikan dengan kekerasan,

konflik dapat diartikan sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan muncul penghancuran, tapi konflik juga bisa dipahami sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penciptaan penyelesaian baru, sedangkan kekerasan adalah situasi ketidaknyamanan yang dialami aktor dimana ketidaknyamanan adalah apa yang seharusnya tidak sama dengan apa yang ada bisa juga berupa suatu sikap yang ditujukan untuk menekan pihak lawan, baik secara fisik, verbal, ataupun psikologi. Dalam teori tentang segitiga kekerasan Galtung, kekerasan terbagi menjadi tiga yaitu kekerasan langsung, kultural dan struktural. Dimana kekerasan langsung seringkali didasarkan atas penggunaan kekuasaan sumber (resource power), yang dibedakan menjadi kekuasaan yang bersifat menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis dan kekuasaan renumeratif. Baik kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengungkapkan kekerasan struktural dan personal dapat menghalangi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini adalah kelestarian atau keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas. Jika empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul ke permukaan sosial.

Pada konflik yang terjadi pada pedagang kaki lima di daerah Semolowaru ini merupakan permasalahan yang melibatkan antara pedagang kaki lima, pemerintah, dan warga sekitar. Dimana awal dari permasalahan ini di mulai pada suatu permasalahan antara warga sekitar dengan para pedagang kaki lima yang berada pada lingkungan daerah semolowaru. Hal ini terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara pedagang kaki lima dan warga sekitar.

Meskipun dengan adanya Konflik yang ada pada pedagang kaki lima yang berada di daerah Semolowaru ini seperti adanya kekerasan budaya konstruksi sosial (*cultural violence/social constructs*) dan kekerasan struktural yang tidak nampak atau abstrak yang diciptakan pemerintah terhadap para pedagang kaki lima, dimana pemerintah kota surabaya melakukan sebuah isu tentang adanya tempat berdagang baru yang nyaman dan banyak pengunjung, juga menciptakan benturan antara para pedagang kaki lima itu sendiri dan menciptakan isu-isu yang akan menjadikan masyarakat ikut kebijakan pemerintah kota Surabaya.

Dengan begitu Kekerasan ini terjadi karena legitimasi kultur yang digerakkan oleh aktor kekerasan melalui kekuatan struktur masyarakat sehingga terciptalah kekerasan langsung. Awal terjadinya konflik kekerasan langsung (*direct violence*) yang nampak kongkrit dilakukan pihak pemerintah melalui satpol PP untuk berperilaku represif kepada pedagang kaki lima

dengan melakukan penggusuran tempat berdagang yang ada di pinggir jalan di semolowaru. Tidak bisa dipungkiri ketika melakukan penggusuran adanya benturan fisik langsung antara pedagang kaki lima dan para petugas satpol PP. Dengan adanya penggusuran ini pemerintah berdalih dengan alasan untuk penertiban dan keindahan kota surabaya. Sehingga Situasi ini membuat pemerintah kota surabaya dan pedagang kaki lima tidak akan terselesaikan. Justru, menjadikan permasalahan baru jika permasalahan ini terlampau terlalu lama. Ketakutannya dengan adanya pihak pihak yang ingin memanfaatkan dengan adanya konflik ini. Sehingga pemerintah kota harus segera menyelesaikan dan mencari jalan keluar. Salah satunya dengan mengambil kebijakan.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengambil kebijakan agar tidak menciptakan konflik baru akibat penggusuran pemerintah. Upaya Pemkot dalam penataan Pedagang Kaki Lima ternyata dianggap beberapa kalangan masih terkesan setengah-setengah. Salah satunya akibatnya adalah upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari Pedagang Kaki Lima. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para Pedagang Kaki Lima pun justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin sehingga disini perlu adanya peran pemerintah untuk lebih bisa meyakinkan para Pedagang Kaki Lima atas kebijakan yang diambil.

Starategi manajemen konflik yang digunakan dalam penyelesaian masalah pedagang kaki lima yang berada pada kawasan semolowaru ini. Resolusi konflik yang bisa ditawarkan adalah dengan melakukan pertemuan dengan para Pedagang Kaki Lima, masyarakat sekitar dan Pemerintah kota. Melalui proses mediasi dimana dalam proses mediasi ini perlu melibatkan adaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator. Dalam penyelesaian ini mediasi dikatakan sebagai proses karena dalam mediasi ini memerlukan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik kepada mediator.

Pada proses ini peran pemerintah sangat jelas dimana lebih menyelesaikan konflik melalui negosiasi. Pada negosiasi ini antara pedagang kaki lima dengan pemerintah saling tawar menawar (*bargaining*). Pada negosiasi ini peran pemerintah sangat jelas sebagai mediator dengan mampu memasuki sistem hubungan konflik, berada diantara pihak pihak yang terlibat konflik secara inparsial untuk mengubah kekuasaan, pola pikir, kepercayaan dan dinamika konflik dengan cara memberikan informasi agar terjadi negosiasi yang lebih baik sehingga mencapai kesepakatan pada permasalahan yang dialami para pedagang kaki lima. Dalam intervensi, mediator berfungsi sebagai fasilitator bukan sebagai

pengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan dari konflik yang terjadi antara para pedagang kaki lima dengan pemerintah karena para pihak yang terlibat konflik menggunakan mediasi karena tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sendiri, antara pedagang kaki lima tidak bisa mengalahkan pemerintah.

Tujuannya dari adanya negosiasi ini adalah untuk menciptakan *win-win solution* dari permasalahan yang pedagang kaki lima, dimana para pedagang kaki lima dan pemerintah harus siap akan konsekuensi yang dilakukan seperti adanya relokasi yang dilakukan pemerintah kepada pedagang kaki lima, kemudian adanya tempat revitalisasi yang harus disiapkan sebelum adanya relokasi tempat berdagang para pedagang kaki lima, hal ini diharapkan mampu menciptakan penyelesaian konflik dan mengubah pandangan para pedagang agar mau untuk di relokasi dari tempat yang sudah lama dijadikan tempat berjualan ke tempat revitalisasi berjualan baru. Dengan Mengubah pikiran bahwa adanya relokasi ini akan mendapatkan tempat yang lebih layak pada saat revitalisasi dilakukan pemerintah. Dengan begitu secara otomatis sentralisasi pedagang kaki lima akan berjalan sesuai yang diharapkan pedagang kaki lima dan pemerintah agar sama-sama merasakan hal yang lebih baik dari adanya relokasi, revitalisasi dan sentralisasi tempat berdagang yang akan memberikan kenyamanan, keamanan, dan peningkatan jumlah pengunjung pedagng kaki lima.

Sehingga perlunya pemahaman dari berbagai pedagang untuk lebih menata kehidupan kota Surabaya untuk di utamakan dan diperlukan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ketertiban masyarakat kota tidak hanya dari pemerintah kota, akan tetapi terbentuk dari peran partisipasi dari berbagai elemen kota Surabaya, Dari hal-hal tersebut di atas sangatlah diharapkan agar dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Surabaya khususnya di kawasan Semolowaru prosesnya sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, harus terencana dengan konsep yang mendalam, terpadu dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tentunya disesuaikan dengan kondisi Kota Surabaya, kajian-kajian tentang Pedagang Kaki Lima sangatlah dibutuhkan sebagai bagian pendukung aspek manusiawi dan regulasi, jadi bukan kajian tentang Pedagang Kaki Lima dilakukan bersamaan dengan penataannya.

### **Berakhirnya Konflik Laten Antara Pedagang Kaki Lima**

Coser membagi konflik sosial menjadi dua, konflik realistik (*langsung*) dan konflik nonrealistik. Konflik realistik adalah suatu bentuk kekecewaan

terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungandan dari perkiraan kemungkinan keuntungan danditujukan pada obyek yang mengecewakan (Poloma.2007: 110). Sedangkan konflik non realistik adalahkonflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan sainganyang antagonistik, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Poloma. 2007: 110).

Selain itu pemerintah memberikan resolusi konflik *win-win solution* tidak hanya pedagang kaki lima dengan pemerintah kota. Resolusi yang diberikan pemerintah antar pedagang kaki lima juga mulai dilakukan pemerintah. Dengan adanya revitalisasi dan sentralisasi ini di harapkan peran pemerintah kota juga ikut dalam mengawasi tempat sentralisasi baru yang telah disediakan oleh pemerintah kota surabaya agar tidak terjadinya konflik baru pada lingkungan baru pada sentralisasi pedagang kaki lima yang berada di lingkungan sentralisasi Unitomo. Konflik laten antara pedagang kaki lima permasalahan yang timbul masih kurangnya antusiasme warga untuk datang ke sentralisasi pedagang kaki lima yang berada di Semolowaru, hal ini menjadikan berkurangnya pemasukan pedagang kaki lima karena kurangnya pembeli dagangan yang berada pada sentralisasi ini, tempat jualan yang disediakan pada sentra pedagang kaki lima yang berada disemolowaru masih terbatas dan hanya berjumlah 50 lapak atau tempat berjualan, hal ini sangat nampak jelas berbeda dengan kouta jumlah pedagang kaki lima yang direlokasi pada sentra pedagang kaki lima ini, hal ini lah yang menjadikan permasalahan baru dengan kurang jelas waktu atau pembagian jam berdagang yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga terkadang pedagang mengeluh dengan masalah ini, dan yang ketiga, mahalnya biaya sewa tempat berjualan ini yang tidak seimbang dengan pemasukan yang dihasilkan oleh para pedagang kaki lima.

Dengan Adanya Realitas penyelesaian konflik persoalan penanganan Pedagang Kaki Lima di Semolowaru harusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dengan melakukan penertiban. Bahwa Pedagang Kaki Lima secara formal memang tidak diperbolehkan berdagang di tempat-tempat yang dilarang, tetapi menggusur mereka ternyata malah memunculkan beban sosial yang lebih berat. Selain itu, akan muncul pengangguran-pengangguran baru yang tentu saja memberikan potensi bagi tindakan-tindakan kriminalitas, juga akan melahirkan persoalan sosio-kultural yang parah. Banyak Pedagang Kaki Lima yang harus menjadi pengangguran ditambah lagi dengan perceraian dengan istrinya, tentunya hanya salah satu fakta dari ratusan fakta terjadinya implikasi negatif dari tergusurnya Pedagang Kaki Lima.

Oleh sebab itu dengan adanya permasalahan yang telah terjadi ini akhirnya menjadikan sebuah Resolusi konflik tanpa kekerasan untuk ke depannya terutama tidak adanya benturan fisik lagi antara Pedagang Kaki atau lebih Lima di semolowaru dengan Pemerintah kota Surabaya. Dimana resolusi yang dilakukan oleh kedua pihak antara pedagang Kaki Lima dan pemerintah kota surabaya dengan tidak menggunakan kekerasan fisik, verbal dan non-verbal. Teknik resolusi konflik ini yang dilakukan pemerintah Surabaya tidak akan menimbulkan luka fisik. Disisi lain juga mampu menyelesaikan konflik laten yang terjadi antar pedagang kaki lima sehingga resolusi ini tidak menimbulkan luka psikologis. Luka psikologis yang timbul, seperti adanya kekecewaan, frustasi, ketegangan antara Pedagang Kaki Lima.

Meskipun begitu dengan adanya resolusi ini sangat bermanfaat secara sosiologis, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas pada lingkungan Sentra Pedagang Kaki Lima yang telah disediakan oleh Pemerintah Surabaya. Salah satunya adalah membuat kebijakan daerah atau kota yang juga berpihak pada sektor-sektor informal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya dengan Kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan Pedagang Kaki Lima tersebut akan memberikan fungsi perlindungan hukum untuk aktivitas Pedagang Kaki Lima, bukan untuk kembali berdagang di tempat terlarang, melainkan tempat yang memang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Misalnya: Pertama, dalam pembangunan Mall ada kewajiban menyediakan ruang sekitar 5-10 persen yang diperuntukkan bagi Pedagang Kaki Lima ; Kedua, dalam pelebaran jalan, pemerintah juga wajib membuat tempat-tempat tertentu bukan di sepanjang jalan melainkan tempat yang agak jauh dari arus utama yang dapat dipergunakan Pedagang Kaki Lima untuk menggelar dagangan; ketiga, membangun sentra Pedagang Kaki Lima di setiap titik kota, salah satu yang diterapkan pada jalan semolowaru karena bagaimanapun Pedagang Kaki Lima ternyata memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan dinamika kota agar lebih hidup; dan keempat, tidak membiarkan tumbuhnya Pedagang Kaki Lima di sebuah tempat yang dilarang berjualan dalam waktu yang lama. Selama ini munculnya Pedagang Kaki Lima di tempat-tempat tertentu karena mereka awalnya dibiarkan berjualan, meskipun baru satu Pedagang Kaki Lima yang berdiri, tapi lambat laun pasti akan diikuti oleh Pedagang Kaki Lima lainnya untuk ikut berjualan di tempat tersebut. Akibatnya, ketika sudah terlihat banyak Pedagang Kaki



Lima yang berjualan di tempat tersebut, maka dipastikan mereka akan kian sulit untuk dilakukan penataan. Karenanya, sebelum berkembang, pemerintah bekerjasama lingkungan setempat untuk tidak memberikan ruang bagi munculnya Pedagang Kaki Lima di tempat-tempat terlarang.

Dengan demikian, upaya penertiban dapat dijalankan ketika pemerintah memang sudah menyediakan solusi tepat bagi Pedagang Kaki Lima untuk tidak kehilangan mata pencahariannya. Begitu pula, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah membiarkan bertumbuh kembangnya Pedagang Kaki Lima di tempat yang dilarang, baru setelah menumpuk diadakan penertiban. Upaya penertiban merupakan langkah terakhir terutama bagi para Pedagang Kaki Lima yang memang sangat sulit untuk diatur dan ditata.

## PENUTUP

### Simpulan

Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena Pedagang Kaki Lima sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Di mata pemerintah citra negatif tersebut telah mendogma. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan agar tata ruang kota yang ada Pedagang Kaki Limanya menjadi tertib dan rapi. Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dalam pandangan pemerintah, tentunya keberadaan Pedagang Kaki Lima yang ada di kota ini mengganggu keindahan dan ketertiban. Penekanan pada struktur penataan kota ini adalah solusi agar Pedagang Kaki Lima tetap membudaya tetapi dengan pemberdayaan yang maksimal dari pemerintah. saat ini pemerintah masih terus berupaya menghilangkan dan menggusur Pedagang Kaki Lima yang menjadi budaya di Indonesia. Sehingga perlunya adanya pembelajaran dengan cara berusaha meminimalisir konflik agar tidak semakin membesar antara Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan memberikan resolusi penyelesaian masalah agar tidak saling dirugikan dalam konflik yang terjadi pada Pedagang kaki Lima yang ada di daerah lain terutama di Semolowaru.

### Saran

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan suatu kajian mengenai aktivitas Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Lainnya Selain Di Surabaya untuk menata dan mengelola kawasan perdagangan secara menyeluruh. Peran pemerintah untuk membuat peraturan daerah yang khusus mengatur Pedagang Kaki Lima dan membuat institusi yang khusus menangani Pedagang Kaki Lima dengan mengevaluasi rencana tata ruang kota yang ada, dengan memasukkan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian elemen kota dan mendapatkan perlindungan hukum untuk berdagang dan menyiapkan lahan berdagang yang sesuai keinginan pedagang kaki lima. Selain itu, Pemerintah lebih tegas memberikan arahan penataan dan kebutuhan ruang aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perdagangan dengan membentuk sebuah paguyuban pedagang kaki lima yang berguna untuk menyatuhkan berbagai kepentingan-kepentingan dari pedagang kaki lima.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana. 2006. *Marginalisasi sektor informal Perkotaan*. Surabaya : ITS Press.
- Hadari, Nawawi, 2001. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sarjono Y. 2001. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima diPerkotaan*. Surakarta : Muhamamdiyah University Press.
- Scott JC. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta. LP3ES.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan manajemen konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Poloma, Margaret M.. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yin, Robert K. 1996. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

### Sumber Online :

Pradana, Putra Dody  
<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swarabhumi/article/view/6820>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2014

Widigdo, Haryo.  
<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swarabhumi/article/view/855y>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2014

Wiyanto, Ari Candra.

<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/tag/1695/pelaku-sektor-informal>. Diakses pada tanggal 8 agustus 2014